



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0037117 tentang hasil klarifikasi 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015, dan Nomor 7 Tahun 2015 taggal 9 April 2015 dan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 180/146/2015 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7), Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2015STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

| NO. | JENIS KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | SATUAN | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|--|---|
| 1. | Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang | I. Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri : 1. Dalam Daerah (Jawa Tengah) 1) Dalam Kota lebih dari 8 jam 2) Dalam Daerah 3) Diklat 2. Luar Daerah 1) Aceh 2) Sumatera Utara 3) Riau 4) Kepulauan Riau 5) Jambi 6) Sumatera Barat 7) Sumatera Selatan 8) Lampung 9) Bengkulu 10) Bangka Belitung 11) Banten 12) Jawa Barat 13) DKI Jakarta 14) DI Yogyakarta 15) Jawa Timur 16) Bali 17) Nusa Tenggara Barat 18) Nusa Tenggara Timur 19) Kalimantan Barat 20) Kalimantan Tengah | Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari | 150.000 370.000 110.000 360.000 370.000 370.000 370.000 370.000 380.000 380.000 380.000 410.000 370.000 430.000 530.000 420.000 410.000 480.000 440.000 430.000 380.000 360.000 | 1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantar jenazah. 2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kepulangan (secara kedinasan) adalah meliputi : Uang makan, uang transpor lokal dan uang saku, dibayarkan secara Lumpsom. 3. Uang Transpor lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan ke tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan. 4. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir, dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kend. dinas. 5. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 250.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 125.000,-, dibayarkan sesuai uang harian 6. Biaya transport dipertanggungjawabkan secara riil/ at cost, dengan ketentuan : a. diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/ |



| NO. | JENIS KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | SATUAN | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|----------------|-------------------------|------------|------------|---|
| | | 21) Kalimantan Selatan | Orang/hari | 380.000 | biaya perjalanan pp). |
| | | 22) Kalimantan Timur | Orang/hari | 430.000 | b. termasuk biaya keterminal bus/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan. |
| | | 23) Kalimantan Utara | Orang/hari | 430.000 | |
| | | 24) Sulawesi Utara | Orang/hari | 370.000 | c. termasuk biaya retribusi masuk terminal/stasiun KA/ bandara/pelabuhan. |
| | | 25) Gorontalo | Orang/hari | 370.000 | |
| | | 26) Sulawesi Barat | Orang/hari | 410.000 | d. termasuk BBM/karcis tol, dll.c. apabila menggunakan kendaraan umum, menyerahkan tiket per org. |
| | | 27) Sulawesi Selatan | Orang/hari | 430.000 | |
| | | 28) Sulawesi Tengah | Orang/hari | 370.000 | e. apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol. |
| | | 29) Sulawesi Tenggara | Orang/hari | 380.000 | |
| | | 30) Maluku | Orang/hari | 380.000 | |
| | | 31) Maluku Utara | Orang/hari | 430.000 | 7. Fasilitas transport : |
| | | 32) Papua | Orang/hari | 580.000 | - Pesawat Udara : Bisnis |
| | | 33) Papua Barat | Orang/hari | 480.000 | - Kapal Laut : VIP/Kelas I A |
| | | | | | - Kereta Api/Bus : Eksekutif |
| | | 3. Diklat | | | |
| | | 1) Aceh | Orang/hari | 110.000 | 8. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM yang dipertanggungjawabkan secara riil/at cost |
| | | 2) Sumatera Utara | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 3) Riau | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 4) Kepulauan Riau | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 5) Jambi | Orang/hari | 110.000 | 9. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang diharuskan menyeter kepada Panitia, maka biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya perjalanan |
| | | 6) Sumatera Barat | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 7) Sumatera Selatan | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 8) Lampung | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 9) Bengkulu | Orang/hari | 110.000 | 10. Untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan Uang Harian (UH) sebesar 75% |
| | | 10) Bangka Belitung | Orang/hari | 120.000 | |
| | | 11) Banten | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 12) Jawa Barat | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 13) DKI Jakarta | Orang/hari | 160.000 | 11. Sewa kendaraan dalam kota untuk acara pokok kedinasan dibayarkan secara riil/At Cost |
| | | 14) DI Yogyakarta | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 15) Jawa Timur | Orang/hari | 120.000 | |
| | | 16) Bali | Orang/hari | 140.000 | 12. Biaya Penginapan dibayarkan riil/At Cost. Jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum |
| | | 17) Nusa Tenggara Barat | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 18) Nusa Tenggara Timur | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 19) Kalimantan Barat | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 20) Kalimantan Tengah | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 21) Kalimantan Selatan | Orang/hari | 110.000 | 13. Fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan Hotel berbintang Lima (*****) atau bintang Empat (****) satu orang per kamar |
| | | 22) Kalimantan Timur | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 23) Kalimantan Utara | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 24) Sulawesi Utara | Orang/hari | 110.000 | 14. Perjalanan dinas dlm daerah kurang dari 100 km yg lebih dr 8 jam menggunakan lumpsum. |
| | | 25) Gorontalo | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 26) Sulawesi Barat | Orang/hari | 120.000 | |



| NO. | JENIS KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | SATUAN | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|----------------|--|------------|------------|---|
| | | 27) Sulawesi Selatan | Orang/hari | 130.000 | 15. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan kepatutan dan kewajaran. |
| | | 28) Sulawesi Tengah | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 29) Sulawesi Tenggara | Orang/hari | 110.000 | |
| | | 30) Maluku | Orang/hari | 110.000 | 16. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, mengacu pada standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 |
| | | 31) Maluku Utara | Orang/hari | 130.000 | |
| | | 32) Papua | Orang/hari | 170.000 | |
| | | 33) Papua Barat | Orang/hari | 140.000 | |
| | | II. Satuan Biaya Transportasi | | | |
| | | 1. Biaya Transportasi | UP | UP | |
| | | 2. Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 10 km | Liter | UP | |
| | | III. Satuan Biaya Penginapan | | | |
| | | 1. Dalam Daerah (Jawa Tengah) | Orang/hari | 1.478.000 | |
| | | 2. Luar Daerah | | | |
| | | 1) Aceh | Orang/hari | 1.308.000 | |
| | | 2) Sumatera Utara | Orang/hari | 1.214.000 | |
| | | 3) Riau | Orang/hari | 1.168.000 | |
| | | 4) Kepulauan Riau | Orang/hari | 1.285.000 | |
| | | 5) Jambi | Orang/hari | 1.176.000 | |
| | | 6) Sumatera Barat | Orang/hari | 1.155.000 | |
| | | 7) Sumatera Selatan | Orang/hari | 1.228.000 | |
| | | 8) Lampung | Orang/hari | 1.299.000 | |
| | | 9) Bengkulu | Orang/hari | 790.000 | |
| | | 10) Bangka Belitung | Orang/hari | 1.310.000 | |
| | | 11) Banten | Orang/hari | 1.430.000 | |
| | | 12) Jawa Barat | Orang/hari | 1.753.000 | |
| | | 13) DKI Jakarta | Orang/hari | 1.086.000 | |
| | | 14) Jawa Tengah | Orang/hari | 1.478.000 | |
| | | 15) DI Yogyakarta | Orang/hari | 1.334.000 | |
| | | 16) Jawa Timur | Orang/hari | 1.359.000 | |
| | | 17) Bali | Orang/hari | 1.810.000 | |
| | | 18) Nusa Tenggara Barat | Orang/hari | 2.738.000 | |
| | | 19) Nusa Tenggara Timur | Orang/hari | 1.000.000 | |
| | | 20) Kalimantan Barat | Orang/hari | 1.130.000 | |
| | | 21) Kalimantan Tengah | Orang/hari | 1.596.000 | |
| | | 22) Kalimantan Selatan | Orang/hari | 1.679.000 | |
| | | 23) Kalimantan Timur | Orang/hari | 3.021.000 | |



| NO. | JENIS KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | SATUAN | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|----------------|--|------------|------------|------------|
| | | 24) Kalimantan Utara | Orang/hari | 3.021.000 | |
| | | 25) Sulawesi Utara | Orang/hari | 1.553.000 | |
| | | 26) Gorontalo | Orang/hari | 1.134.000 | |
| | | 27) Sulawesi Barat | Orang/hari | 1.030.000 | |
| | | 28) Sulawesi Selatan | Orang/hari | 1.912.000 | |
| | | 29) Sulawesi Tengah | Orang/hari | 1.298.000 | |
| | | 30) Sulawesi Tenggara | Orang/hari | 1.070.000 | |
| | | 31) Maluku | Orang/hari | 1.030.000 | |
| | | 32) Maluku Utara | Orang/hari | 1.512.000 | |
| | | 33) Papua | Orang/hari | 1.668.000 | |
| | | 34) Papua Barat | Orang/hari | 1.482.000 | |
| | | IV. Untuk Perjalanan Kurang Dari 100 Km | | | |
| | | A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km | | | |
| | | Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal) | Orang/hari | 200.000 | |
| | | B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km | | | |
| | | 1. Wilayah Kecamatan 0 km s/d jarak 25 Km | Orang/hari | 75.000 | |
| | | 2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km | Orang/hari | 87.500 | |
| | | 3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km | Orang/hari | 200.000 | |
| | | 4. Daerah terpencil | Orang/hari | 250.000 | |

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

